**“MENGANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN
PRASARANA PERMUKIMAN PADA KECAMATAN
MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG”**

OLEH

KELOMPOK 1

<i>A.NUR ASMUL</i>	<i>19.023.22.201.216</i>
<i>HERA CINDY AULIA</i>	<i>18.023.22.201.116</i>
<i>JHON TAULINGGI</i>	<i>18.023.22.201.091</i>
<i>FIKSAL</i>	<i>18.023.22.201.124</i>

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA PALOPO
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat.

Tidak lupa, kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah sebagai tugas akhir dari mata kuliah "Perencanaan Wilayah Dan Kota"

Kami tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, Kami mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Demikian apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu khususnya kepada Dosen Mata kuliah kami yang telah membimbing dalam menulis makalah ini.

Soppeng 16 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
• A. Latar Belakang.....	1
• B. Rumusan Masalah.....	1
• C. Tujuan Penulisan	1
BAB II LANDASAN TEORI.....	2
• 1. Definisi Sarana Dan Prasarana	2
• 2. Standar Sarana Dan Prasarana	4
BAB III PEMBAHASAN	18
• 1. Gambaran Umum.....	18
• 2. Jumlah penduduk 5 tahun terakhir beserta Proyeksinya.....	18
• 3. Kebutuhan sarana dan prasarana Tahun 2025,2030,2035,2040	19
BAB IV PENUTUP	26
• A. Kesimpulan	26
• B. Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA	

“Menganalisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Permukiman Pada Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng”

A.Nur Asmul, Hera Cindy Aulia, Jhon Taulinggi, fiksah, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Andi Djemma Palopo 2022

Abstrak

Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah, 2003). Pelaksanaan perencanaan ruang wilayah ini disinonimkan dengan hasil akhir yang hendak dicapai, yaitu tata ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Selain itu, penataan ruang diharapkan dapat mengefisienkan pembangunan dan meminimalisasi kualitas lingkungan penduduk.

Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Soppeng dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Kecamatan Marioriwawo menjadi salah satu kawasan yang direncanakan sebagai pusat kegiatan di Kab Soppeng dengan luas wilayah sebesar 300 Km². Dan yang akan kita analisis pertumbuhan penduduknya untuk mengetahui sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari tahun ke tahun

Metode yang di gunakan untuk menganalisis hasil proyeksi dan menghitung kebutuhan sarana ini adalah dengan Metode Kuantitatif dengan menggunakan data dari BPS dan perhitungan yang matematis untuk mendapatkan proyeksi penduduknya, dan juga menggunakan tabel dasar kebutuhan sarana dari setiap sarana, untuk mendapatkan setiap kebutuhan sarana akibat bertambahnya jumlah penduduk.

Hasil yang didapatkan dari analisis proyeksi penduduk adalah dapat kita lihat bahwa setiap tahun jumlah penduduk bertambah seiring dengan bertambahnya pula kebutuhan sarana dan prasarana di daerah tersebut

Proyeksi penduduk di perlukan pemerintah untuk memproyeksikan penduduk yang sesuai dengan tanggung jawabnya untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dari rakyat melalui pembangunan yang terencana.

Kata kunci : *Menganalisis Proyeksi Penduduk, Menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana*

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah, 2003). Pelaksanaan perencanaan ruang wilayah ini disinonimkan dengan hasil akhir yang hendak dicapai, yaitu tata ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Selain itu, penataan ruang diharapkan dapat mengefisiensikan pembangunan dan meminimalisasi kualitas lingkungan penduduk.

Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Soppeng dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; dengan ditetapkannya Undang -Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Kecamatan Marioriwawo menjadi salah satu kawasan yang direncanakan sebagai pusat kegiatan di Kab Soppeng dengan luas wilayah sebesar 300 Km2. Dan yang akan kita analisis pertumbuhan penduduknya untuk mengetahui sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari tahun ke tahun

1. Rumusan Masalah

adapun rumusan masalah makalah ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Apa yang dimaksud dengan perencanaan wilayah dan kota?
- 2) Menganalisis pertumbuhan penduduk dari hasil proyeksi dari tahun sebelumnya.
- 3) Menganalisis Kebutuhan sarana dan prasarana dari data hasil proyeksi pertumbuhan penduduk

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut

- 1) Untuk mengetahui apa itu Perencanaan wilayah dan Kota
- 2) Untuk mengetahui hasil analisis pertumbuhan penduduk dari hasil proyeksi dari tahun sebelumnya.
- 3) Untuk mengetahui hasil analisis Kebutuhan sarana dan prasarana dari data hasil proyeksi pertumbuhan penduduk

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Definisi Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan dasar dari suatu area permukiman (Fisu, 2018). Pemenuhan sarana dan prasarana tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan permukiman, namun juga dapat meningkatkan perekonomian penduduk (Fisu, 2020)

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatial space) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Infrastruktur metujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg,1988 dalam Kodoatie,2005:8). Sementara itu adapun pengertian prasarana menurut Jayadinata (1992 dalam Juliawan,2015:5) prasarana merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalاندengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai, prasarana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota. Dengan demikian prasarana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota, yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota.

Prasarana lingkungan merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, lebih jelasnya prasarana lingkungan atau sarana yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman adalah jaringan jalan untuk mobilitas orang dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur, jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan, serta jaringan saluran air hujan untuk pematusan (drainase) dan pencegah banjir setempat.

Fungsi prasarana adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan

funksinya, upaya memperbaiki lingkungan membutuhkan keseimbangan antar tingkat kebutuhan masyarakat (Diwiryono, 1996 dalam Juliawan, 2015:6) 22.

Dari pengertian tersebut dapat disederhanakan bahwa prasarana merupakan kerangka dasar dari suatu sistem, kerangka dasar tersebut menjadi fasilitas umum dan pelengkapan dasar fisik yang memungkinkan lingkungan untuk berfungsi sebagaimana mestinya, serta menjadi penentu keberhasilan dari suatu perkembangan kota.

Sebagai salah satu konsep pola pikir di bawah ini diilustrasikan diagram sederhana bagaimana peran infrastruktur. Diagram ini menunjukkan bahwa secara ideal lingkungan alam merupakan pendukung dari sistem infrastruktur, dan sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur. Sistem sosial sebagai obyek dan sasaran didukung oleh sistem ekonomi.

Gambar Hubungan antara Sistem Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Lingkungan Alam yang Harmoni, Sumber: Grigg, 1988

Dari gambar di atas dapat dikatakan bahwa lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua sistem yang ada. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Infrastruktur yang kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi manusia. Sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakekatnya akan merugikan manusia termasuk makhluk hidup yang lain. Berfungsi sebagai suatu sistem pendukung sistem sosial dan sistem ekonomi, maka infrastruktur perlu dipahami dan dimengerti secara jelas terutama bagi penentu kebijakan.

2. Standar Sarana Dan Prasarana

a) Sarana Pendidikan

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan: a) berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan; b) optimasi daya tampung dengan satu shift; c) efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu; d) pemakaian sarana dan prasarana pendukung; e) keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal / umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU). 25 dari 52

Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:

- a) taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
- b) sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar

yang menyelenggarakan program enam tahun;

- c) sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan proram tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
- d) sekolah menengah umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
- e) sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.

Tabel 1 Kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Taman Kanak-kanak	1.250	216 termasuk rumah perjaga 36 m ²	500	0,28 m ² /jiwa	500 m'	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.	Sekolah Dasar	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA dalam satu kompleks
3.	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m'		
4.	SMU	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m'		
5.	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1.000 m'	Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan lingkungan.	

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

Tabel 2 Kebutuhan ruang belajar pada SD/MI, SLTP/MTs dan SMU

Kebutuhan ruang belajar			
Rumus 1 Tingkat pra belajar	Rumus 2 Tingkat SD/MI (berdasarkan sistem pendidikan SD 6 tahun)	Rumus 3 Tingkat SLTP/MTs (berdasarkan sistem pendidikan SLTP/MTs)	Rumus 4 Tingkat SMU (berdasarkan sistem pendidikan SMU)
$S = \frac{(UP5 - Us) \times a\%}{E}$	$S_{SD} = \frac{(D_{P5} - D_s) \times d\%}{E}$	$S_{SLTP} = \frac{(L_{SD5} - L_{SDS}) \times p\%}{E}$	$S_{SLTA} = \frac{(L_{SLTP5} - L_{SLTPS}) \times a\%}{E}$
<p>Keterangan :</p> <p>S kebutuhan jumlah ruang belajar tingkat pra sekolah;</p> <p>UP5 hasil proyeksi anak usia pra sekolah selama 5 tahun;</p> <p>Us jumlah anak usia pra sekolah yang sudah tertampung;</p> <p>a% anak usia pra sekolah yang ingin masuk pendidikan pra sekolah;</p> <p>E daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi lingkungan 35-40 siswa.</p>	<p>Keterangan :</p> <p>S_{SD} kebutuhan jumlah ruang belajar tingkat SD/MI;</p> <p>D_{P5} hasil proyeksi anak usia SD/MI selama 5 tahun;</p> <p>D_S jumlah anak usia tingkat SD/MI yang sudah tertampung;</p> <p>d% presentase jumlah anak tingkat SD/MI yang perlu memasuki lembaga pendidikan tingkat SD/MI;</p> <p>E daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi lingkungan 40 siswa.</p>	<p>Keterangan :</p> <p>S_{SLTP} kebutuhan ruang belajar tingkat SLTP;</p> <p>L_{SD5} proyeksi lulusan SD selama 5 tahun;</p> <p>L_{SDS} jumlah lulusan SD yang dapat ditampung;</p> <p>p% presentase lulusan SD yang melanjutkan ke SLTP;</p> <p>E daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi lingkungan 40 siswa.</p>	<p>Keterangan :</p> <p>S_{SLTA} kebutuhan ruang belajar tingkat SLTA;</p> <p>L_{SLP5} proyeksi lulusan SLTP selama 5 tahun sesuai data dan instansi yang berwenang;</p> <p>L_{SLPS} jumlah lulusan SLTP yang dapat ditampung;</p> <p>a% presentase lulusan SLTP yang melanjutkan ke SLTA;</p> <p>E daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi lingkungan 40 siswa.</p>

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

b) Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan adalah

- posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;
- balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (curative) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
- balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) / Klinik Bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah

- melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun;
- d) puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam 29 dari 52 penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
- e) puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
- f) tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
- g) apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

Tabel 3 Kebutuhan sarana kesehatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3.	BKIA / Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6.	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1.500 m'	-idem-	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7.	Apotik / Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m'	-idem-	

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

c) Sarana Pribadatan

Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena 30 dari 52 berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat penghuni yang bersangkutan, maka kepastian tentang jenis dan jumlah fasilitas peribadatan yang akan dibangun baru dapat dipastikan setelah lingkungan perumahan dihuni selama beberapa waktu. Pendekatan perencanaan yang diatur adalah dengan memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religius.

Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan / blok yang nantinya lahir sesuai konteks lingkungannya. Penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu.

Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya.

Adapun jenis sarana ibadah untuk agama Islam, direncanakan sebagai berikut;

- a) kelompok penduduk 250 jiwa, diperlukan musholla/langgar;
- b) kelompok penduduk 2.500 jiwa, disediakan masjid;
- c) kelompok penduduk 30.000 jiwa, disediakan masjid kelurahan; dan
- d) kelompok penduduk 120.000 jiwa, disediakan masjid kecamatan.

Untuk sarana ibadah agama lain, direncanakan sebagai berikut:

- a) katolik mengikuti paroki;
- b) hindu mengikuti adat; dan
- c) budha dan kristen protestan mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga.

Tabel 4 Kebutuhan sarana peribadatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Musholla/Langgar	250	45	100 bila bangunan tersendiri	0,36	100 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain
2.	Mesjid Warga	2.500	300	600	0,24	1.000 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga.
3.	Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	1.800	3.600	0,12		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Mesjid Kecamatan	120.000	3.600	5.400	0,03		Berdekatan dengan pusat lingkungan / kelurahan. Sebagian sarana berlantai 2, KDB 40%
5.	Sarana ibadah agama lain	Tergantung sistem kekerabatan / hirarki lembaga	Tergantung kebiasaan setempat	Tergantung kebiasaan setempat	-	-	-

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

d) Sarana Perdagangan Dan Niaga

Sarana perdagangan dan niaga ini tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan / blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Menurut skala pelayanan, penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah:

- a) toko/warung (skala pelayanan unit RT $\approx$ 250 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari;
- b) pertokoan (skala pelayanan 6.000 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap dan pelayanan jasa seperti wartel, fotocopy, dan sebagainya;

- c) pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan ≈ 30.000 penduduk), yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah- SNI 03-1733-2004 32 dari 52 buahan, beras, tepung, bahan-bahan pakaian, pakaian, barang-barang kelontong, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, serta pelayanan jasa seperti warnet, wartel dan sebagainya;
- d) pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kecamatan ≈ 120.000 penduduk), yang selain menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, elektronik, juga untuk pelayanan jasa perbengkelan, reparasi, unit-unit produksi yang tidak menimbulkan polusi, tempat hiburan serta kegiatan niaga lainnya seperti kantor-kantor, bank, industri kecil dan lain-lain.

Tabel 5 Jenis sarana perdagangan dan niaga

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m^2 /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m^2)	Luas Lahan Min. (m^2)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Toko / Warung	250	50 (termasuk gudang)	100 (bila berdiri sendiri)	0,4	300 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain
2.	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	0,5	2.000 m'	Di pusat kegiatan sub lingkungan. KDB 40% Dapat berbentuk P&D
3.	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30.000	13.500	10.000	0,33		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	36.000	0,3		Terletak di jalan utama. Termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

- e) Sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga

Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu lansekap, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri no. 4 tahun 1988, yang menyatakan "Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan dan 35 dari 52 fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan

penyangga kehidupan wilayah perkotaan.

Penggolongan sarana ruang terbuka hijau di lingkungan perumahan berdasarkan kapasitas pelayanannya terhadap sejumlah penduduk. Keseluruhan jenis ruang terbuka hijau tersebut adalah :

- a) setiap unit RT $\approx$ kawasan berpenduduk 250 jiwa dibutuhkan minimal 1 untuk taman yang dapat memberikan kesegaran pada kota, baik udara segar maupun cahaya matahari, sekaligus tempat bermain anak-anak;
- b) setiap unit RW $\approx$ kawasan berpenduduk 2.500 jiwa diperlukan sekurang-kurangnya satu daerah terbuka berupa taman, di samping daerah-daerah terbuka yang telah ada pada tiap kelompok 250 penduduk sebaiknya, yang berfungsi sebagai taman tempat main anak-anak dan lapangan olah raga kegiatan olah raga;
- c) setiap unit Kelurahan $\approx$ kawasan berpenduduk 30.000 jiwa diperlukan taman dan lapangan olahraga untuk melayani kebutuhan kegiatan penduduk di area terbuka, seperti pertandingan olah raga, upacara serta kegiatan lainnya;
- d) setiap unit Kecamatan $\approx$ kawasan berpenduduk 120.000 jiwa, harus memiliki sekurangkurangnya 1 (satu) lapangan hijau terbuka yang berfungsi sebagai tempat pertandingan olah raga (tenis lapangan, bola basket dan lain-lain), upacara serta kegiatan lainnya yang membutuhkan tempat yang luas dan terbuka;
- e) setiap unit Kecamatan $\approx$ kawasan berpenduduk 120.000 jiwa, harus memiliki sekurangkurangnya 1 (satu) ruang terbuka yang berfungsi sebagai kuburan/pemakaman umum; dan
- f) selain taman dan lapangan olah raga terbuka, harus disediakan jalur-jalur hijau sebagai cadangan/sumber-sumber alam, sekaligus berfungsi sebagai filter dari polusi yang dihasilkan oleh industri, dengan lokasi menyebar.
- g) diperlukan penyediaan jalur hijau sebagai jalur pengaman lintasan kereta api, dan jalur pengaman bagi penempatan utilitas kota, dengan lokasi menyebar;
- h) pada kasus tertentu, mengembangkan pemanfaatan bantaran sungai sebagai ruang terbuka hijau atau ruang interaksi sosial (river walk) dan olahraga.

Tabel 6 Sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Luas Lahan Min. (m ²)	Standard (m ² /jiwa)	Radius pencapaian (m)	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian
1.	Taman /Tempat Main	250	250	1	100	Di tengah kelompok tetangga.
2.	Taman/ Tempat Main	2.500	1.250	0,5	1.000	Di pusat kegiatan lingkungan.
3.	Taman dan Lapangan Olah Raga	30.000	9.000	0,3		Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan.
4.	Taman dan Lapangan Olah Raga	120.000	24.000	0,2		Terletak di jalan utama. Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan.
5.	Jalur Hijau	-	-	15 m		Terletak menyebar.
6.	Kuburan / Pemakaman Umum	120.000				Mempertimbangkan radius pencapaian dan area yang dilayani.

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

f) Prasarana/ Utilitas – Jaringan drainase

Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan, yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan. Bagian dari jaringan drainase adalah:

Tabel 7 Bagian jaringan drainase

Sarana	Prasarana
Badan penerima air	Sumber air di permukaan tanah (laut, sungai, danau)
	Sumber air di bawah permukaan tanah (air tanah akifer)
Bangunan pelengkap	Gorong-gorong
	Pertemuan saluran
	Bangunan terjunan
	Jembatan
	Street inlet
	Pompa
	Pintu air

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

g) Prasarana/ Utilitas – Jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga. Untuk itu, lingkungan

perumahan harus dilengkapi jaringan air limbah sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan air bersih lingkungan perumahan di perkotaan.

Beberapa ketentuan yang terkait adalah:

- a) SNI 03-2399-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum.
- b) SNI 03-1745-1989 tentang Tata Cara Pemasangan Sistem Hidran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung.

Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air bersih yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah:

- a) kebutuhan air bersih;
 - b) jaringan air bersih;
 - c) kran umum; dan
 - d) hidran kebakaran
- h) Prasarana/ Utilitas – Jaringan air limbah

Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan air limbah sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan / perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan air limbah lingkungan perumahan di perkotaan.

Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air limbah yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah:

- a) septik tank;
 - b) bidang resapan; dan
 - c) jaringan pemipaan air limbah.
- i) Prasarana/ Utilitas – Jaringan persampahan

Lingkungan perumahan harus dilayani sistem persampahan yang mengacu pada:

- a) SNI 19-2454-2002 tentang Tata cara teknik operasional pengolahan sampah perkotaan;
- b) SNI 03-3242-1994 tentang Tata cara pengelolaan sampah di permukiman; dan
- c) SNI 03-3241-1994 tentang Tata cara pemilihan lokasi tempat pembuangan

akhir sampah.

Jenis-jenis elemen perencanaan yang harus disediakan adalah gerobak sampah; bak sampah; tempat pembuangan sementara (TPS); dan tempat pembuangan akhir (TPA).

Tabel 8 Kebutuhan prasarana persampahan

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan	
	Sarana pelengkap	Status	Dimensi		
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi	-	--	
RW (2500 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah kecil		6 m ³		Gerobak mengangkut 3x seminggu
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³		Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		12 m ³		Mobil mengangkut 3x seminggu
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	TPS/TPA lokal	-		
	Bak sampah besar		25 m ³		
Kota (> 480.000 jiwa)	Bak sampah akhir	TPA	-		
	Tempat daur ulang sampah		-		

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

j) Prasarana/ Utilitas – Jaringan listrik

Lingkungan perumahan harus dilengkapi perencanaan penyediaan jaringan listrik sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang mengacu pada:

- SNI 04-6267.601-2002 tentang Istilah kelistrikan (Bab 601: Pembangkitan, Penyaluran dan Pendistribusian Tenaga Listrik – Umum);
- SNI 04-8287.602-2002 tentang Istilah kelistrikan (Bab 602: Pembangkitan); dan
- SNI 04-8287.603-2002 tentang Istilah kelistrikan (Bab 603: Pembangkitan, Penyaluran dan Pendistribusian Tenaga Listrik – Perencanaan dan Manajemen Sistem Tenaga Listrik

Pemasangan seluruh instalasi di dalam lingkungan perumahan ataupun dalam bangunan hunian juga harus direncanakan secara terintegrasi dengan berdasarkan peraturanperaturan dan persyaratan tambahan yang berlaku, seperti:

- Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL);
- peraturan yang berlaku di PLN wilayah setempat; dan
- peraturan-peraturan lain yang masih juga dipakai seperti antara lain AVE.

Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan listrik yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah:

- a) kebutuhan daya listrik; dan
- b) jaringan listrik.

k) Prasarana/ Utilitas – Jaringan telepon

Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan telepon sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan / perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan telepon lingkungan perumahan di perkotaan.

Jenis prasarana dan utilitas jaringan telepon yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah:

- a) kebutuhan sambungan telepon; dan
- b) jaringan telepon.

l) Prasarana/ Utilitas – Jaringan transportasi lokal

Lingkungan perumahan direkomendasikan untuk dilalui sarana jaringan transportasi lokal atau memiliki akses yang tidak terlampau jauh (maksimum 1 km) menuju sarana transportasi tersebut. Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan transportasi sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan / perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan transportasi lingkungan perumahan di perkotaan.

Perencanaan lingkungan permukiman dalam skala besar berpengaruh terhadap peningkatan pergerakan penduduk/warga, sehingga harus diimbangi dengan ketersediaan prasarana dan sarana jaringan transportasi umum lokal, jaringan sirkulasi pedestrian yang mendukung pergerakan dari menuju pusat kegiatan dan lingkungan hunian, serta jaringan parkir yang terintegrasi dalam daya dukung lingkungan yang disesuaikan dengan pusat kegiatan yang ada.

Berbagai jenis elemen perencanaan terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang harus direncanakan dan disediakan pada jaringan transportasi lokal adalah:

- a) sistem jaringan sirkulasi kendaraan pribadi dan kendaraan umum berikut terminal / penghentiannya;
- b) sistem jaringan sirkulasi pedestrian; dan
- c) sistem jaringan parkir;

Perencanaan pada jaringan transportasi lokal ini harus mempertimbangkan

penyesuaian dengan kebutuhan / kondisi konteks lokal yang telah dimiliki. Hal ini termasuk optimalisasi pemanfaatan karakter pergerakan setempat eksisting serta beragam jenis moda transportasi dan transit yang telah dimiliki di area sekitar perencanaan. Perencanaan pada jaringan transportasi lokal ini juga harus memperhatikan integrasi jaringan transportasi setempat dengan jaringan regional yang lebih luas dengan standar pelayanan yang mudah dipahami / diterima bagi masyarakat umum tanpa menghilangkan karakter / konteks khas setempat yang dimiliki. Dari keseluruhan elemen perencanaan sistem transport ini pertimbangan utama adalah keterpaduannya untuk mewujudkan konsep perencanaan pusat lingkungan sebagai pusat transit yang memungkinkan dengan mudah dilakukannya pergantian antar dan inter moda transportasi.

Tabel 9 Kriteria manajemen sistem transportasi lokal pada lingkungan

No.	Jenis Kegiatan Kajian	Rincian
1.	Kajian pembebanan jaringan jalan	jalur khusus angkutan umum searah arus, berlawanan arus, ataupun dari / ke area bangkitan kegiatan integrasi berbagai moda transportasi yang berbeda jalur penghubung antara angkutan umum dengan jaringan pejalan kaki, atau kendaraan lain
2.	Kajian sistem pengoperasian angkutan umum	modifikasi rute dan jadwal angkutan pelayanan bus ekspres
3.	Kajian manajemen angkutan umum	peningkatan terminal bus peningkatan tempat pemberhentian bus
4.	Kajian koordinasi antar moda	fasilitas parkir bersebelahan dengan terminal fasilitas dan perbaikan sistem transfer antar rute dan moda

CATATAN Acuan diambil dari analisa kajian berbagai sumber

Tabel 10 Berbagai fasilitas pendukung, perlengkapan jalan dan angkutan

umum

Hirarki Jalan Perumahan	Perlengkapan Jalan	Fasilitas Pendukung	Angkutan Umum	Beban As (MST)	Keterangan
Lokal Sekunder I (LS I)	- rambu - marka jalan - lampu lalu lintas di persimpangan - tanpa kereb	- teluk bis - parkir di badan jalan - jalur pejalan kaki (trotoar tanpa kereb)	- angkot (minibus ≤ 12 tempat duduk) - bis (< 24 tempat duduk)	≥ 8 ton	(PP 43/1993) (PP 26/1985)
Lokal Sekunder II (LS II)	- ada rambu jika perlu - pengendali kecepatan - tanpa kereb	- teluk bis - parkir di badan jalan - jalur pejalan kaki (trotoar tanpa kereb)	- angkot (minibus ≤ 12 tempat duduk)	≥ 8 ton	---
Lokal Sekunder III (LS III)	- ada rambu jika perlu - pengendali kecepatan - tanpa kereb	- jalur pejalan kaki (trotoar tanpa kereb) - parkir di luar badan jalan	---	< 5 ton	---
Lingkungan I (LK I)	---	- jalur pejalan kaki (trotoar tanpa kereb) - parkir di luar badan jalan	---	---	---
Lingkungan II (LK II)	---	- jalur pejalan kaki (trotoar tanpa kereb) - parkir di luar badan jalan	---	---	---

CATATAN Acuan disadur dari Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum: 1998

BAB III

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

2. Jumlah Penduduk 5 Tahun terakhir beserta Proyeksinya

NO	KECAMATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	RASIO (r)	TAHUN 2025
1	MARIORIWAWO	45,105	48,200	0.069	64,737

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015	TAHUN 2020	RASIO (r)	TAHUN 2030
1	MARIORIWAWO	45,105	48,200	0.069	81,274

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015	TAHUN 2020	RASIO (r)	TAHUN 2035
1	MARIORIWAWO	45,105	48,200	0.069	97,811

NO	KECAMATAN	TAHUN 2015	TAHUN 2020	RASIO (r)	TAHUN 2040
1	MARIORIWAWO	45,105	48,200	0.069	114,347

3. Kebutuhan Sarana dan prasarana tahun 2025,2030,2035,2040

a) Sarana Pendidikan

Tahun 2025

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Tahun 2025	Jumlah Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Pendukung	Kebutuhan Berdasarkan SNI	Penambahan
1	TK	64,737	10	1,250	52	42
2	SD		37	1,600	40	3
3	SMP		13	4,800	13	0
4	SMA		3	4,800	13	10

Tahun 2030

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Tahun 2030	Jumlah Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Pendukung	Kebutuhan Berdasarkan SNI	Penambahan
1	TK	81,274	10	1,250	65	55
2	SD		37	1,600	51	14
3	SMP		13	4,800	17	4
4	SMA		3	4,800	17	14

Tahun 2035

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Tahun 2035	Jumlah Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Pendukung	Kebutuhan Berdasarkan SNI	Penambahan
1	TK	97,811	10	1,250	78	68
2	SD		37	1,600	61	24
3	SMP		13	4,800	20	7
4	SMA		3	4,800	20	17

Tahun 2040

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Tahun 2040	Jumlah Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Pendukung	Kebutuhan Berdasarkan SNI	Penambahan
1	TK	114,347	10	1,250	91	81
2	SD		37	1,600	71	34
3	SMP		13	4,800	24	11
4	SMA		3	4,800	24	21

b) Sarana Kesehatan

Tahun 2025

NO	Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk 2025	Jumlah Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk Pendukung	Kebutuhan Berdasarkan SNI	Penambahan
1	Posyandu	64,737	0	1,250	52	52
2	Balai Pengobatan Warga		0	2,500	26	26
3	BKIA/ Klinik Bersalin		0	4,800	13	13
4	Puskesmas Pembantu Dan Balai Pengobatan Lingkungan		1	4,800	13	12
5	Puskesmas dan Balai Pengobatan Lingkungan		2	120,000	1	-1
6	Tempat Praktek Dokter		0	5,000	13	13
7	Apotik		1	30,000	2	1

Tahun 2030

NO	Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk 2030	Jumlah Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk Pendukung	Kebutuhan Berdasarkan SNI	Penambahan
1	Posyandu	81,274	0	1,250	65	65
2	Balai Pengobatan Warga		0	2,500	33	33
3	BKIA/ Klinik Bersalin		0	4,800	17	17
4	Puskesmas Pembantu Dan Balai Pengobatan Lingkungan		1	4,800	17	16
5	Puskesmas dan Balai Pengobatan Lingkungan		2	120,000	1	-1
6	Tempat Praktek Dokter		0	5,000	16	16
7	Apotik		1	30,000	3	2

Tahun 2035

NO	Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk 2035	Jumlah Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk Pendukung	Kebutuhan Berdasarkan SNI	Penambahan
1	Posyandu	97,811	0	1,250	78	78
2	Balai Pengobatan Warga		0	2,500	39	39
3	BKIA/ Klinik Bersalin		0	4,800	20	20
4	Puskesmas Pembantu Dan Balai Pengobatan Lingkungan		1	4,800	20	19
5	Puskesmas dan Balai Pengobatan Lingkungan		2	120,000	1	-1
6	Tempat Praktek Dokter		0	5,000	20	20
7	Apotik		1	30,000	3	2

Tahun 2040

NO	Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk 2040	Jumlah Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk Pendukung	Kebutuhan Berdasarkan SNI	Penambahan
1	Posyandu	114,347	0	1,250	91	91
2	Balai Pengobatan Warga		0	2,500	46	46
3	BKIA/ Klinik Bersalin		0	4,800	24	24
4	Puskesmas Pembantu Dan Balai Pengobatan Lingkungan		1	4,800	24	23
5	Puskesmas dan Balai Pengobatan Lingkungan		2	120,000	1	-1
6	Tempat Praktek Dokter		0	5,000	23	23
7	Apotik		1	30,000	4	3

c) Sarana Perdagangan Dan Niaga

Tahun 2025

No	Sarana Perdagangan	Jumlah Penduduk Tahun 2025	Jumlah Sarana Perdagangan	Jumlah Penduduk Pendukung	Kebutuhan Berdasarkan SNI	Penambahan
1	Toko/Warung	64,737	101	250	259	158
2	Pertokoan		3	6,000	11	8
3	Pusat Pertokoan/ Pasar lingkungan		0	30,000	2	2
4	Pusat Perbelanjaan Niaga		5	120,000	1	-4

Tahun 2030

No	Sarana Perdagangan	Jumlah Penduduk Tahun 2025	Jumlah Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Pendukung	Kebutuhan Berdasarkan SNI	Penambahan
1	Toko/Warung	81,274	101	250	325	224
2	Pertokoan		3	6,000	14	11
3	Pusat Pertokoan/ Pasar lingkungan		0	30,000	3	3
4	Pusat Perbelanjaan Niaga		5	120,000	1	-4

Tahun 2035

No	Sarana Perdagangan	Jumlah Penduduk Tahun 2025	Jumlah Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Pendukung	Kebutuhan Berdasarkan SNI	Penambahan
1	Toko/Warung	97,811	101	250	391	290
2	Pertokoan		3	6,000	16	13
3	Pusat Pertokoan/ Pasar lingkungan		0	30,000	3	3
4	Pusat Perbelanjaan Niaga		5	120,000	1	-4

Tahun 2040

No	Sarana Perdagangan	Jumlah Penduduk Tahun 2025	Jumlah Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Pendukung	Kebutuhan Berdasarkan SNI	Penambahan
1	Toko/Warung	114,347	101	250	457	356
2	Pertokoan		3	6,000	19	16
3	Pusat Pertokoan/ Pasar lingkungan		0	30,000	4	4
4	Pusat Perbelanjaan Niaga		5	120,000	1	-4

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Proyeksi penduduk di perlukan pemerintah untuk memproyeksikan penduduk yang sesuai dengan tanggung jawabnya untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dari rakyat melalui pembangunan yang terencana.

Proyeksi penduduk dapat di gunakan untuk, perencanaan yang tujuannya untuk menyediakan jasa sebagai respon terhadap penduduk yang sudah di proyeksi kan, perencanaan yang tujuannya untuk merubah trend penduduk menuju ke perkembangan demografi sosial dan Ekonomi.

Untuk memproyeksi kan jumlah penduduk pada waktu yang akan datang dalam jangka waktu yang relatif pendek dapat di lakukan baik dengan menggunakan metode matematik maupun metode komponen karena hasil secara total hampir tak ada perbedaan.

B. Saran

Ada pun yang menjadi saran dari isi pembahasan makalah ini adalah :

1. Di harapkan kepada Pemerintah untuk selalu teliti dan aktif dalam memproyeksikan proyeksi penduduk, demi memperbaiki kondisi sosial Ekonomi masyarakat.
2. Di harapkan kepada Pemerintah untuk melakukan sensus penduduk sesuai dengan ketentuan yang telah di bentuk agar dapat memenuhi permintaan secara efisien dalam keperluan suatu Negara oleh pemerintah.

<https://soppengkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZDFiNTEExNTYxNGVhYmE3NjI0MTE5MmY1&xzmn=aHR0cHM6Ly9zb3BwZW5na2FiLmJwcyy5nbY5pZC9wdWJsaWNhdGlvbI8yMDIxLzA5LzI0L2QxYjUxMTU2MTRlYWJhNzYyNDExOTJmNS9rZWNhbfWF0YW4tbWYyaW8tcml3YXdvLWRhbGFtLWFuZ2thLTlwMjEuaHRtbA%3D%3D&twoadfnorfeauf=MjAyMi0wMS0xNiAxMT0lMT0yOQ%3D%3D>

Mas Natsir. 1998. Perumahan Ilegal di Ujung Pandang, halaman 8-11. Tesis Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.